

Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Desa

Mita Suliyatini¹ . Evada Dewata², Indra Satriawan³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

[mitasuliyatini2302@gmail.com*](mailto:mitasuliyatini2302@gmail.com)

Abstract

The purpose of this study is to ascertain how village finance management in Muara Pinang District, Empat Lawang Regency, is impacted by accountability and transparency. Village officials from 22 different villages in the Muara Pinang District made up the study's population. Saturated sampling is the sample collection method employed in this study. This kind of study uses primary data and quantitative methods, distributing 88 questionnaires to 22 respondents in Muara Pinang District, Empat Lawang Regency. Using SPSS 26 software, the multiple regression analysis method is the analytical technique employed. Partial hypothesis testing results indicate that the factors of accountability and transparency together have a favorable impact on village financial management. The variables of accountability and transparency in the Muara Pinang are the research's contribution.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Financial Management

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini melibatkan perangkat desa dari 22 desa di Kecamatan Muara Pinang. Penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Penelitian kuantitatif dengan data primer dilakukan di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, dengan menyebarkan 22 kuisioner, total 88 kuisioner. Analisis regresi berganda dilakukan menggunakan program SPSS 26. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa faktor-faktor transparansi dan akuntabilitas secara keseluruhan berkontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan desa. variabel transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang berkontribusi pada penelitian ini.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa

Diterima Redaksi :19-05-2025 | Selesai Revisi : 29-06-2025 | Diterbitkan Online : 30-06-2025

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi rujukan utama dalam mengatur tata kelola keuangan desa. Pasal 1 ayat (1) UU tersebut secara jelas menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang ini, desa diberikan wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk pengelolaan dana desa yang menjadi fokus utama dalam pembangunan dan pemberdayaan desa.

Sumber pendapatan desa yang begitu banyak maka keuangan desa harus dikelola dengan baik, sebagaimana yang diatur pada pasal 2 Peraturann

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan menyebutkan bahwa APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan data yang ada di Indonesia sudah 155 korupsi dana desa. Korupsi telah menjadi salah satu masalah serius yang menghadang pembangunan di Indonesia. Dana desa merupakan sumber dana yang signifikan yang dialokasikan kepada pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun fenomena korupsi dalam pengelolaan dana desa telah menjadi perhatian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa, korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan yang signifikan. Catatan ICW, pada tahun 2016 korupsi dana desa mencapai 17 kasus. Kemudian pada tahun 2017 kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus dan naik lagi menjadi 83 pada tahun 2018, dan terdapat 96 kasus pada tahun 2019, 2020 menunjukkan 129 kasus korupsi, ada 154 kasus dan pada tahun 2021 dan di Tahun 2022 meningkat 155 kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Untuk yang terdata saja, ada 500 an kasus korupsi di tingkat desa dengan nilai ratusan milyar rupiah tercatat mulai tahun 2016-2022.

Penelitian ini bermotivasi pada fenomena yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang yaitu penyelewengan dana desa. Seperti kasus penyelewengan dana desa tahun 2022 Empat Desa pada Kabupaten Empat Lawang adapun dugaan indikasi kerugian negara akibat penyalangunaan dan penyelewengan pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) di 4 Desa tersebut mencapai lebih dari Rp. 8.479.000.000,00 (Delapan Milyar Empat Ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah). (Sumsel Budget Center).

Kecamatan Muara Pinang merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Empat Lawang yang memperoleh anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat. Kecamatan Muara Pinang terdiri 22 desa yang mendapatkan aliran dana desa. Sejak dana desa mulai disalurkan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat, Kecamatan Muara Pinang sendiri mulai memperoleh dana desa di tahun 2016. Anggaran dana desa yang diterima oleh pemerintah desa setiap tahunnya terbilang cukup besar sehingga diperlukan adanya pengelolaan keuangan yang baik. Melinda dkk (2022) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus transparan dan akuntabel agar keuangan desa dapat meningkatkan ekonomi dan pembangunan desa dengan tepat.

Menurut Pratama (2022) Dampak dari rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat luas. Salah satunya adalah penghambatan potensi pembangunan di tingkat desa. Dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terkendala akibat praktek-praktek yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Selain itu, rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas juga dapat menghambat upaya pemerataan ekonomi di tingkat desa. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa bukan hanya meningkatkan efektivitas penggunaan dana pembangunan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan institusi pemerintahan secara keseluruhan Pagayow & Patma (2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian Masruhi & Kaukab (2019) menyatakan fenomena yang memperkuat pengambilan data di kecamatan ini dapat mencakup berbagai faktor, seperti ketersediaan dokumentasi yang lengkap dan terstruktur mengenai anggaran desa,

kerjasama aktif dari pihak pemerintah desa dan kecamatan dalam menyediakan informasi, serta keterbukaan dalam menjelaskan proses pengelolaan keuangan desa kepada peneliti. Sedangkan penelitian oleh Septiana & Hermanto (2021) yang menyatakan pengelolaan keuangan desa telah menjadi fokus utama dalam diskusi pembangunan lokal, terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perannya yang sangat signifikan sebagai indikator untuk menilai kemajuan dan keberhasilan pembangunan di tingkat desa.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2023:16). Objek yang akan peneliti ambil adalah 22 desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 22 Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 22 Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yang berjumlah 88 orang. Teknik Pengambilan data pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Sampel Pada Penelitian ini berjumlah 88 orang.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya, karena lebih efisien bila peneliti ingin tahu secara pasti variabel yang akan diukur. Penyebaran kuisisioner ini yang difokuskan kepada aparatur desa di Kecamatan Muara Pinag Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

2.4. Definisi Operasioanal

Variabel independen pada penelitian ini adalah transparansi (X1), Akuntabilitas (X2). Sedangkan untuk variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan desa (Y). Operasional penelitian ini di uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 1 Operasional Variabel				Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Perencanaan	
Variabel	Dimensi	Indikator	Skala			
Transparansi (X ₁)	Informatif	-Terdapat pengumuman kemudahan akses -Menyampaikan Informasi -Meningkatkan informasi transparansi kepada masyarakat	Likert		Pelaksanaan	-Menyusun Raperdes -Menyampaikan Raperdes -Menyepakati Raperdes -Menetapkan APBDesa -Penyimpanan uang operasional -Pengeluaran Desa -Pembuatan RAB -Penyetoran pajak
	Keterbukaan	-Tersedianya dokumen yang mudah diakses -Keterlibatan masyarakat -Keterbukaan seluruh tahapan			Penatausahaan	-Melakukan Buku Kas Umum(BKU) dan Kas Pembantu (KP) -Tersedianya buku kas umum -Penutupan buku kas umum (BKU)
	Pengungkapan	-Laporan pertanggungjawaban -Tersedianya dokumen anggaran -Jujur dalam pemberian informasi			Pelaporan	-Laporan Realisasi APBDesa -Laporan berisi laporan APBDesa dan Laporan LRK
Akuntabilitas (X ₂)	Kejujuran dan Hukum	-Menyampaikan penyelenggara berdasarkan perundang-undangan -Menyampaikan informasi dan pertanggungjawaban tepat waktu	Likert		Pertanggungjawaban	-Laporan Pertanggungjawaban kepada bupati/walikota -Laporan disertai LRAPBdesa, CALK dan laporan lainnya -Informasi kepada masyarakat
	Manajerial program	-Masyarakat terlibat dalam rapat -Adanya sarana masyarakat untuk menilai kinerja				
	Kebijakan	-Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu -Mempertanggung jawabkan kebijakan				

Tabel pengukuran yang digunakan untuk mengubah data kualitatif dari kuisioner menjadi urutan data kuantitatif adalah dengan skala likert – type dengan lima tingkatan yang menghasilkan data interval (Cooper & Schindler, 2014). Untuk pernyataan positif alternatif dapat memberikan jawaban dengan masing-masing akan diberikan skor yaitu : nilai 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Kurang Setuju (KS), 4 = Setuju (S), 5 = Sangat Setuju (SS).

2.5 Uji instrumen Penelitian

2.5.1 Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif

No	Variabel	Dimensi	No.Item	Skor Rata-Rata
1.	Transparansi (X1)	Transparansi Informatif	1-3	4,09
		Transparansi Keterbukaan	4-6	4,07
		Transparansi Pengungkapan	7-9	4,01
	Rentang		1-9	4,05
2.	Akuntabilitas (X2)	Akuntabilitas Kejujuran dan hokum	1-2	4,02
		Akuntabilitas Proses	3-6	4,25
		Akuntabilitas Program	7-8	4,15
		Akuntabilitas Kebijakan	9-10	4,04
		Rentang	1-10	4,11
	3.	Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Perencanaan	1-4
Pelaksanaan			5-8	4,08
Penatausahaan			9-11	4,00
Pelaporan			12-13	4,20
Pertanggungjawaban			14-16	4,17
Rentang		1-16	4,10	

Sumber : Data Primer, diolah peneliti 2024,

Berdasarkan tabel 2, rincian dari variabel frekuensi jawaban responden sebagai berikut :

1. Variabel transparansi (X1) diwakili oleh 9 butir pertanyaan dan setiap pertanyaan diukur dengan skala 1-5. Penilaian jawaban responden terhadap transparansi tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor rata-rata setiap item pertanyaan pada variabel transparansi sebesar 4,05. Dimensi yang memiliki rata-rata maksimum (tertinggi) untuk variabel ini adalah transparansi informatif dengan nilai rata-rata 4,09. Dimensi yang memiliki nilai rata-rata minimum (terendah) untuk variabel transparansi adalah transparansi pengungkapan dengan nilai rata-rata 4,01.
2. Variabel akuntabilitas (X2) diwakili oleh 10 butir pertanyaan dan setiap pertanyaan diukur dengan skala 1-5. Penilaian jawaban responden terhadap akuntabilitas tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor rata-rata setiap item pertanyaan pada variabel akuntabilitas sebesar 4,11. Dimensi yang memiliki rata-rata maksimum (tertinggi) untuk variabel ini adalah akuntabilitas proses dengan nilai rata-rata 4,25. Dimensi yang memiliki nilai rata-rata minimum (terendah) untuk variabel

akuntabilitas adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum pengungkapan dengan nilai rata-rata 4,02.

3. Variabel pengelolaan keuangan desa (Y) diwakili oleh 16 butir pertanyaan dan setiap pertanyaan diukur dengan skala 1-5. Penilaian jawaban responden terhadap pengelolaan keuangan desa tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor rata-rata setiap item pertanyaan pada variabel pengelolaan keuangan desa sebesar 4,10. Dimensi yang memiliki nilai rata-rata maksimum (tertinggi) untuk variabel ini adalah pelaporan yang tinggi dengan nilai rata-rata 4,20. Dimensi yang memiliki nilai rata-rata minimum (terendah) untuk variabel ini adalah penatausahaan dengan nilai rata-rata 4,00.

2.5.2 Hasil Uji Kualitas Data

Tabel 3 Uji Validitas Variabel Transparansi

Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	Tanda	R-Tabel	Pengambilan Keputusan
X1.1	0,765	>	0,2096	Valid
X1.2	0,662	>	0,2096	Valid
X1.3	0,760	>	0,2096	Valid
X1.4	0,479	>	0,2096	Valid
X1.5	0,298	>	0,2096	Valid
X1.6	0,384	>	0,2096	Valid
X1.7	0,754	>	0,2096	Valid
X1.8	0,691	>	0,2096	Valid
X1.9	0,754	>	0,2096	Valid

Sumber: Data Primer, diolah peneliti 2024, SPSS 26 Version

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat hasil pengujian validitas yang dilakukan peneliti terhadap sebelas item pertanyaan yang digunakan dalam variabel Transparansi (X1). Nilai r hitung untuk 9 Pertanyaan instrumen secara masing-masing dapat dilihat dari kolom pearson Colleration. Secara keseluruhan r hitung > dari r tabel (0,2096), sehingga sembilan pertanyaan di atas dapat dikatakan valid. Oleh karena itu, dari sembilan pertanyaan telah memenuhi uji validitas dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	Tanda	R-Tabel	Pengambilan Keputusan
X2.1	0,668	>	0,2096	Valid
X2.2	0,722	>	0,2096	Valid
X2.3	0,565	>	0,2096	Valid
X2.4	0,838	>	0,2096	Valid
X2.5	0,524	>	0,2096	Valid
X2.6	0,598	>	0,2096	Valid
X2.7	0,618	>	0,2096	Valid
X2.8	0,747	>	0,2096	Valid
X2.9	0,612	>	0,2096	Valid
X2.10	0,722	>	0,2096	Valid

Sumber: Data Primer, diolah peneliti 2024, SPSS 26 Version

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat hasil pengujian validitas yang dilakukan peneliti terhadap sebelas item pertanyaan yang digunakan dalam variabel Akuntabilitas (X2). Nilai r hitung untuk 10 Pertanyaan instrumen secara masing-masing dapat dilihat dari kolom pearson Colleration. Secara keseluruhan r hitung > dari r tabel (0,2096), sehingga sepuluh pertanyaan di atas dapat dikatakan valid. Oleh karena itu, dari sembilan pertanyaan telah memenuhi uji validitas dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	Tanda	R-Tabel	Pengambilan Keputusan
Y.1	0,841	>	0,2096	Valid
Y.2	0,518	>	0,2096	Valid
Y.3	0,841	>	0,2096	Valid
Y.4	0,841	>	0,2096	Valid
Y.5	0,836	>	0,2096	Valid
Y.6	0,841	>	0,2096	Valid
Y.7	0,841	>	0,2096	Valid
Y.8	0,809	>	0,2096	Valid
Y.9	0,809	>	0,2096	Valid
Y.10	0,260	>	0,2096	Valid
Y.11	0,809	>	0,2096	Valid
Y.12	0,805	>	0,2096	Valid
Y.13	0,788	>	0,2096	Valid
Y.14	0,624	>	0,2096	Valid
Y.15	0,788	>	0,2096	Valid
Y.16	0,490	>	0,2096	Valid

Sumber: Data Primer, diolah peneliti 2024, SPSS 26 Version

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat hasil pengujian validitas yang dilakukan peneliti terhadap enam belas

item pertanyaan yang digunakan dalam variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Nilai r hitung untuk 10 Pertanyaan instrumen secara masing-masing dapat dilihat dari kolom pearson Colleration. Secara keseluruhan r hitung > dari r tabel (0,2096), sehingga sepuluh pertanyaan di atas dapat dikatakan valid. Oleh karena itu, dari sembilan pertanyaan telah memenuhi uji validitas dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

2.5.3 Uji Reliabilitas

Tabel 6 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	R tabel	Pengambilan Keputusan
Transparansi (X1)	0,727	0,6	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,829	0,6	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,938	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah peneliti 2024, SPSS 26 Version

Tabel hasil uji reliabilitas menunjukan nilai Cronbach Alpha melebihi 0,6 sehingga instrumen kuisioner yang digunakan dapat dikatakan handal. Nilai Cronbach Alpha tertinggi terdapat pada variabel Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 0,938 sehingga dikategorikan dapat diterima lalu untuk variabel lainya juga termasuk kategori dapat diterima karena nilai Cronbach Alpha berada pada kisaran di atas 0,6.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini perangkat desa pada dua puluh dua dalam Kecamatan Muara Pinang. Responden setiap desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 88 responden. Sehingga didapat jumlah sampel dalam penelitian yaitu sebanyak 88 responden. Data penelitian yang digunakan adalah sebanyak 88 kuisioner yang langsung diberikan pada setiap desa yang terdapat dalam Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Rincian tingkat pengembalian kuisioner dari responden dapat dilihat pada tabel 7:

Tabel 7 Penyebaran dan Pengembalian Kuisioner

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah kuisioner yang disebar	88
2.	Jumlah kuisioner yang kembali	88
3.	Responden Rate	100 %

Sumber: Data primer yang sudah diolah

3.2. Analisis Regresi linier Berganda

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk mengukur besarnya pengaruh variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dengan bantuan Software SPSS versi 26.

Berdasarkan hasil uji koefisien detirminasi di tabel 8 diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,151.

Demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel transparansi dan akuntabilitas adalah sebesar **15,1 %**. Sisahnya sebesar 84,9 % adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Semakin rendah nilai R Square maka artinya dampak suatu variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Desa, semakin memiliki pengaruh yang lemah.

Tabel 8 hasil analisis regresi liner berganda

	Model	Coefficients B	Uji-t	Sig.
1	(Constant)	11.245	.844	.401
	Transparansi	.735	2.418	.018
	Akuntabilitas	.604	3.012	.003
2	Adjusted R Square	.151		
3	Uji-F	8.721		
	Sig.	.000		

Sumber: Data Primer, diolah peneliti 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di tabel 8 diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,151. Demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel transparansi dan akuntabilitas adalah sebesar **15,1 %**. Sisahnya sebesar 84,9 % adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Semakin rendah nilai R Square maka artinya dampak suatu variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Desa, semakin memiliki pengaruh yang lemah.

Transparansi (X1) memiliki nilai thitung sebesar 2,418. Hasil yang diperoleh untuk ttabel sebesar 1,98827, dikarenakan thitung > ttabel (2,418>1,98827) maka dapat diketahui bahwa **Ha diterima dan Ho ditolak**. Sehingga, dapat disimpulkan Transparansi (X1) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Muara Pinang. Akuntabilitas (X2) memiliki nilai thitung sebesar 3,012. Hasil yang diperoleh untuk t tabel 1,98827, dikarenakan thitung > ttabel (3,012>1,98827) maka dapat diketahui bahwa **Ha diterima dan Ho ditolak**. Sehingga, dapat disimpulkan Akuntabilitas (X2) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Muara Pinang.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis, nilai signifikan variabel Transparansi pada penelitian ini adalah 0,018 kurang dari 0,05 yang berarti variabel tersebut signifikan dan nilai thitung (2.418) > ttabel (1.98827). Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga dapat ditetapkan bahwa **H0 ditolak atau H1 diterima**. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa implementasi transparansi (X1) dapat mendorong terjadinya peningkatan Pengelolaan keuangan Desa (Y) di Kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian

terdahulu yang diteliti oleh risya & Nurodin dkk (2017), Septipastuti (2019) dan Indah Setiarani Erganda et al.,(2021) ketiga penelitian tersebut menghasilkan penelitian yang konsisten dimana Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan keuangan Desa.

Transparansi adalah kunci untuk manajemen keuangan desa yang baik. membantu menciptakan lingkungan di mana sumber daya digunakan dengan cara yang tepat, efektif, dan adil untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Ini karena transparansi membuat perangkat desa lebih bertanggung jawab dan membuat informasi mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tingkat transparansi yang tinggi dapat mencegah korupsi dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan jawaban responden yang ditunjukkan pada tabel 3, dimensi transparansi informatif menerima jumlah jawaban tertinggi untuk variabel transparansi. Untuk menghindari penyalahgunaan uang desa, setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa harus menunjukkan keterbukaan kepada masyarakat. Ketika pemerintah desa mengikuti pedoman informatif tentang pengelolaan keuangan desa, hal ini menunjukkan bahwa hal itu dapat mencegah korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Untuk menghindari kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus memberikan informasi keuangan kepada masyarakat secara akurat, tepat waktu, lengkap, mudah diakses, dan mudah dipahami. Transparansi pengungkapan adalah variabel dengan frekuensi jawaban terendah, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis, nilai signifikan variabel akuntabilitas pada penelitian ini adalah 0,003 kurang dari 0,05 yang berarti variabel tersebut signifikan dari nilai thitung (3,012) > ttabel (1,98827). Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat ditetapkan bahwa **H0 ditolak dan H2 diterima**, maka hipotesis telah terbukti yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Citra kumala Dewi dkk., (2019), Nabilla (2023) dan Elisa Rama Yanti dkk., (2023) ketiga penelitian tersebut menghasilkan penelitian yang konsisten dimana Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan keuangan Desa.

Dengan menerapkan akuntabilitas pada pemerintah desa, kinerja anggaran akan lebih baik karena terdapat tanggung jawab untuk menjalankan anggaran dan membuat pelaporan yang tepat. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Muara Pinang sangat memperhatikan akuntabilitas. Responden yang menjawab setuju bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan anggaran harus diawasi dan dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya, yang mendukung pernyataan ini.

Faktor akuntabilitas proses mendapat tanggapan tertinggi, menurut jawaban responden yang ditunjukkan dalam tabel 3. Dalam dimensi ini, setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan tidak menyalahgunakan posisi atau wewenang yang diberikan. Ini juga menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Jika ada akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan desa, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat. Selain itu, akuntabilitas yang baik juga dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran dan perencanaan desa. Keuangan desa dapat dikelola dengan jelas, efisien, dan efektif dengan akuntabilitas yang baik. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah harus lebih bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan APBDes, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut Tabel 3, variabel akuntabilitas kejujuran dan hukum memiliki frekuensi jawaban terendah. Oleh karena itu, jika akuntabilitas kejujuran dan hukum ditingkatkan lagi, kemungkinan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Muara Pinang akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi secara simultan (Uji F) penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil perhitungan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 0,8721 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 2,71 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dari hasil analisis kekuatan hubungan secara simultan atau analisis untuk mengetahui seberapa besarnya variabel bebas (independen) menjelaskan variabel terikat (dependen), maka diketahui bahwa koefisien determinasi R Square sebesar 15,1 %. Sedangkan sisahnya sebesar 84,9 % diperoleh oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. Penelitian ini selaras dengan penelitian Elisa Rama Yanti, dkk (2023) dan Indah Setiana Erganda (2021) yang

menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil uji hipotesis, yaitu koefisien determinasi (R²), uji-t (parsial), dan uji-F, menunjukkan bahwa variabel independen memiliki dampak positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Muara Pinang memiliki kemampuan untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dengan meningkatkan transparansi untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara transparan kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat waktu.

4. Kesimpulan

Transparansi (X₁) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa terdapat keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas (X₂) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Desa karena semakin baik pertanggungjawaban, maka semakin baik pula penerapan kinerja pada pemerintah desa. Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

Daftar Rujukan

- Alfala, M. K., Mukhzarudfa, M., & Mansur, F. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 747-753
- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34-50.
- Baviga, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci. *Jurnal Cafetaria*, 4(1), 1-19.

- Erganda, I. S. (2020). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada 13 Desa di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor (*Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan*).
- Faizah, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763-776.
- Faridah, & Suryono, B. (2015). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(5), 1–20.
- Garung, C. Y., L. L. Ga. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kec. Sasitamean Kab. Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* 8 (1):19 – 27.
- Ghozali, I. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi*. Edisi Ke-Sembilan Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Hardianto, A., Budiman, B., & Candra, C. (2022). Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa: *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 123-145.
- Indonesia Corruption Watch (ICW) Korupsi Dana Desa 2016-2022, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>
- Lupiyoadi Rambat, Bramulyo Ridho Ikhsan. (2015). *Pratikum Motode Riset Bisnis*. Jakarta Selatan. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Masruhi, A., & Kaukab, M. E. (2019). The Influence of Apparatus Competency, Organizational Commitment, Community Participation, and Clarity of Budget Targets on Village Fund Management (Empirical Study of Village Officials in Mojotengah District, Wonosobo Regency). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Melinda, F., Dewata, E., & Oktarida, A. (2022). Determinan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV)*, 10(1), 148-162.
- Moh, F. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 57-64.
- Nabilla, S. D., & Desitama, F. S. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1347-1359.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107.
- Nugroho, Wahyuningsih, dan Alliyah (2020). Impact of Accountability, Transparency, and Community Participation on Village Fund Management (Case Study of 10 Village Governments in Tahunan District, Jepara Regency). *Journal Of Accounting And Tax*, 23(1), 1–19.
- Pratama, L. A. A. P. (2022). Strategi Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang pemerintahan desa perspektif Masalah Mursalah (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Reu, F. M., & Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 38-59.
- Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap

pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(11), 74-80.

Kota Sungai Penuh). *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 12(01), 53-64.

Septian, R. L., Wawo, A., & Jannah, R. (2021). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dengan sifat amanah sebagai variabel moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 179-193.

Septiviasuti, U. (2019). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*).

Septiana, S., & Hermanto, S. B. (2021). The Effect of Good Corporate Governance on Village Fund Management Performance. *Journal of Accounting Science and Research*, 10(1), 131–138.

Septiningtyas, E. (2018). Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan: Studi pada Pemerintah Kabupaten X. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 17(2), 223-236.

Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(2), 223-236.

Soleh dan Rochmansjah. 2015. "Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes) Berbasis Performance Based Budgeting (PBB) Di Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Administrasi Publik* 4(2): 145-158.

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R& D. Edisi Kedua*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Yanti, E. R., Wiralestari, W., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung